

Citarum Munculkan Konflik :

Program Antarinstansi Sering Tumpang Tindih

Program normalisasi Sungai Citarum di Jawa Barat yang dijalankan sejumlah lembaga pemerintah dinilai tumpang tindih sehingga memunculkan konflik. Salah satu contohnya pembangunan kandang sapi komunal di wilayah hulu Citarum yang justru merusak perkebunan teh. Padahal, perkebunan teh merupakan kawasan terbuka hijau yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan air. Selain itu, pembangunan kandang itu juga turut memperluas okupasi perkebunan oleh warga secara ilegal. "Sekarang, luas lahan yang diduduki warga sekitar 10 hektar," ujar Kepala Urusan Humas PT Perkebunan Nusantara VIII Lilik A Arifin di Bandung, Rabu (1/1).

"Program normalisasi Citarum terkesan tumpang tindih sehingga timbul konflik antara masyarakat dan lembaga pemerintah atau di antara sesama instansi pemerintah," kata Ketua Forum Penyelamat Lingkungan Hidup Thio Setiowekti. Program itu dikoordinasikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan melibatkan sejumlah instansi pemerintah, baik kementerian, pemerintah daerah, maupun badan usaha milik negara.

Rp 35 triliun

Untuk menjalankan program senilai Rp 35 triliun itu, Bappenas membentuk Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP). Salah satu programnya adalah penanganan limbah kotoran sapi wilayah hulu Citarum di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Selama ini, peternak di Tarumajaya membuang kotoran ternak langsung ke sungai sehingga mencemari Citarum.

Untuk mengatasi masalah itu, ICWRMIP bersama Dinas Kesehatan serta Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung menginisiasi pembangunan kandang sapi komunal dan fasilitas daur ulang sampah sejak pertengahan 2013. Pembangunan itu memakan area produktif Kebun Teh Kertamanah milik PTPN VIII.

Koordinator Aliansi Rakyat untuk Citarum Dadang Sudardja menilai, selama ini ICWRMIP terkesan hanya menjadi sekumpulan proyek yang dijalankan sejumlah instansi. "Koordinasi antarlembaga terlihat lemah sehingga proyek ini kurang terintegrasi dan tidak komprehensif," katanya.

Menurut dia, kandang sapi komunal dan fasilitas daur ulang sampah yang dibangun di area perkebunan merupakan bukti program yang tumpang tindih itu. Pembangunan kandang sapi komunal memang bagus, tetapi seharusnya dilakukan di lahan yang sesuai peruntukan. "Bisa saja peternakan sapi di sisi Citarum itu dipindah sehingga tak lagi mencemari sungai," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Achmad Kustijadi menyatakan, pembangunan fasilitas daur ulang di Tarumajaya telah dikonsultasikan dengan PTPN VIII. Bupati Bandung telah mengirim surat permohonan agar PTPN VIII memberikan lahan miliknya seluas 1 hektar untuk dipakai sebagai kandang sapi komunal dan fasilitas daur ulang sampah. (HRS)